

BAB II

OKI DAN KLAIM AS ATAS STATUS YERUSALEM.

2.1 ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)

2.1.1 LATAR BELAKANG BERDIRINYA OKI

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) adalah organisasi internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). OKI terdiri dari 57 negara Muslim atau mayoritas Muslim. Kantor pusat OKI terletak di Jeddah, Arab Saudi. Fokus utama OKI saat ini adalah mengatasi Islamophobia, mempromosikan kepentingan komunitas Muslim di seluruh dunia dan mengkonsolidasikan kerjasama negara Islam dalam forum dan organisasi internasional.²¹

Berdirinya OKI tidak lepas dari kondisi politik dunia Islam. Pada tanggal 21 agustus 1969, dunia islam dikejutkan dengan adanya pembakaran Masjid Al Aqsha di Yerusalem oleh Israel. Para Pemimpin negara muslim atau mayoritas muslim berkumpul di Rabat, Maroko untuk membahas insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa. Pertemuan tersebut merupakan KTT pertama yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara muslim. Pada awalnya, tujuan dari pertemuan ini hanya untuk membahas insiden pembakaran terhadap Al-Aqsa. Namun pada akhirnya, setelah perdebatan panjang para peserta rapat kemudian membahas isu yang lebih

²¹ Pekkan Hakala, dan Andreas Kettis, *The Organisation of Islamic Cooperation: Defined –for Better and Worse–by its Religion Dimension*, (Laporan, European Union, 2013).

luas. Pertemuan tersebut kemudian dianggap sebagai awal dari pembentukan Organisasi Kerjasama Islam²².

Secara umum latar belakang berdirinya OKI adalah Pada tahun 1964 diadakannya KTT Arab di Mogindishu. Pada KTT tersebut, timbul gagasan untuk menghimpun kekuatan Islam dalam satu wadah internasional. Pada tahun 1965 diselenggarakannya sidang Liga Arab sedunia di Jeddah, Saudi Arabia yang mencetuskan gagasan untuk menjadikan umat Islam sebagai kekuatan besar dan menggalang solidaritas Islamiyah dalam usaha melindungi umat Islam, khususnya dari Zionisme. Pada tahun 1967 terjadi perang 6 hari Timur Tengah melawan Israel. Perang ini menjadikan solidaritas umat Islam di Timur Tengah semakin meningkat. Pada tahun 1968, Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke negara-negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut terkait pembentukan Organisasi Islam Internasional. Tanggal 21 agustus 1969 Israel merusak mesjid Al Aqsha yang menyebabkan kemarahan umat Islam seluruh dunia. Peristiwa pembakaran kemudian menjadi puncak pertemuan pemimpin negara-negara Islam membentuk OKI.²³

2.1.2 TUJUAN DAN PRINSIP OKI

Tujuan didirikannya OKI adalah mengumpulkan sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengonsolidasikan segala upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama untuk memajukan

²² Muhammad Azhar, *Mengenal Dari Dekat : Organisasi Kenferensi Islam (OKI)*, jurnal Tarjih Edisi ke 3 Januari 2002. Hal. 79-80

²³ Ija Sunanta, 2015, *Politik Hubungan Internasional ISLAM (Siyasah Dauliyah)*, Bandung : Pustaka Setia. Hal. 250

perdamaian dan kewanitaan dunia muslim. Secara khusus, OKI bertujuan pula memperkuat solidaritas islam diantara negara anggotanya, memperkuat kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek. Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan februari 1972, telah diadopsi piagam Organisasi yang menyebutkan tujuan OKI secara lebih lengkap yaitu sebagai berikut²⁴ : 1). Memperkuat dan memperkuat : a). Solidaritas di antara negara Anggota. b). Kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek. c). Perjuangan umat muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya. 2). Aksi bersama Untuk : Melindungi tempat-tempat suci Islam dan Memberi semangat dan dukungan kepada rakyat palestina dalam memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya. 3). Bekerja sama untuk : Menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan dan Menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian di antara negara-negara anggota dan negara lain.

OKI untuk mencapai tujuannya terdapat 5 prinsip.²⁵ Prinsip tersebut adalah : 1). Persamaan mutlak antara negara-negara anggota. 2). Menghormati hak menentukan nasib sendiri dan tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain. 3). Menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara. 4). Menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dengan cara damai, seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrase. 5). Absten dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik suatu negara.

²⁴ Ibid. Hal 250-251.

²⁵ Ibid.

2.1.3 BADAN-BADAN UTAMA OKI

OKI terdiri dari beberapa badan utama, sebagai berikut²⁶:

A. Konferensi Tingkat Tinggi Islam

KTT Islam terdiri dari para raja, kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara anggota. KTT Islam merupakan otoritas tertinggi di dalam organisasi. KTT Islam melaksanakan sidang satu kali dalam setiap tiga tahun untuk membicarakan, mengambil keputusan, dan memberikan bimbingan terhadap semua isu yang berkaitan dengan realisasi tujuan serta mempertimbangkan isu-isu lain yang menjadi perhatian negara anggota dan umat.

B. Dewan Menteri Luar Negeri

Konferensi Tingkat Menteri atau Dewan Menteri Luar Negeri yaitu pertemuan para menteri luar negeri dari seluruh negara anggota. Dewan ini melaksanakan pertemuan sekali dalam setahun. Dewan Menteri Luar Negeri juga dianggap sebagai sarana untuk mengimplementasikan kebijakan umum OKI, yakni dengan mengadopsi keputusan dan resolusi mengenai masalah-masalah kepentingan bersama dan meninjau kemajuan pelaksanaan keputusan dan resolusi yang diadopsi pada KTT sebelumnya.

C. Sekretariat Jenderal

Sekretaris Jenderal menjadi kepala administratif kantor dari organisasi. Sekretaris Jenderal akan dipilih oleh Dewan Menteri Luar Negeri dalam jangka waktu lima tahun. Pemilihan Sekretaris jenderal harus dipilih dari warga negara anggota yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemetaan geografis, rotasi dan

²⁶ Yurisa Irawan, 2016, *Strategi Resolusi Konflik OKI Dalam Konflik Thailand Selatan*. Skripsi, Padang : Jurusan HI, Universitas Andalas. Hal. 80

kesempatan yang sama untuk semua negara anggota dengan pertimbangan karena kompetensi, integritas serta pengalaman.

Sekretaris Jenderal OKI memiliki tanggung jawab sebagai berikut²⁷: 1). Memberikan perhatian untuk badan organisasi. 2). Menindak lanjuti keputusan, resolusi, dan rekomendasi dari KTT Islam, Dewan Menteri Luar Negeri dan pertemuan Menteri lainnya. 3). Menyiapkan Negara anggota dengan kertas kerja dan memorandum, dalam pelaksanaan keputusan, resolusi dan rekomendasi dari KTT dan Dewan Menteri Luar Negeri. 4). Mengoordinasikan dan menyelaraskan pekerjaan Organ yang relevan dari Organisasi. 5). Mempersiapkan program dan anggaran kesekretariatan OKI. 6). Meningkatkan komunikasi antara negara anggota dan memfasilitasi konsultasi dan pertukaran pandangan serta penyebaran informasi yang bisa menjadi sangat penting untuk negara-negara anggota. 7). Melakukan fungsi lain seperti yang dipercayakan kepadanya oleh KTT atau Dewan Menteri Luar Negeri. 8). Menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan menteri Luar Negeri.

2.1.4 NEGARA ANGGOTA DAN PENGAMAT OKI.

Negara anggota OKI yang bergabung sejak 1969 terdapat 25 negara, mereka adalah Afganistan, Aljazair, Arab Saudi, Chad, Guinea, Indonesia, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Mesir, Niger, Pakistan, Palestina, Senegal, Sudan, Somalia, Tunisia, Turki, Yaman dan Yordania.

²⁷ Organisation Of Islamic Cooperation, General Sekretariat. Diakses dalam https://www.oic-oci.org/page/?p_id=38&p_ref=14&lan=en (09/05/18, 00:13WIB)

Kemudian 6 negara bergabung pada tahun 1972 adalah Bahrain, Oman, Qatar, Suriah, Uni Emiret Arab, Sierra Leona. Tahun 1974, 7 negara yang bergabung OKI adalah Banglaadesh, Gabon, Gambia, Guinea-Bissau, Uganda, Burkina Faso dan Kamerun. Irak kemudian bergabung pada tahun 1975. Setahun kemudian, 1976 Komoro dan Maladewa bergabung. Pada tahun 1978 Djibouti bergabung. Benin bergabung tahun 1983. Tahun 1984 Brunei Darussalam menjadi anggota. Nigeria bergabung tahun 1986. Pada tahun 1992 terdapat lima negara yang bergabung yakni, Azerbaijan, Albania, Kirgizstan, Tajikistan dan Turkmenistan. Mozambik menjadi anggota pada tahun 1994 disusul tahun 1995 Kazahstan. Tahun 1996 Uzbekistan dan Suriname menjadi Anggota. Togo menjadi anggota tahun 1997. Guyana tahun 1998 dan Pantai Gading menjadi anggota termuda yang bergabung pada 2001²⁸.

OKI selain diperkuat anggotanya, juga memiliki beberapa entitas pengamat dari berbagai latar belakang. Terdapat 5 negara menjadi pengamat di OKI yakni Bosnia dan Herzegovina, (1994), Republik Afrika Tengah (1996), Thailand (1998), Rusia (2005) dan Siprus Turki (1979). Adapun untuk Organisasi/komunitas muslim yang menjadi pengamat adalah Front Pembebasan Islam Moro (1977) dari Filiphina. Untuk pengamat dari Institusi Islam ialah Uni Parlemen Negara Anggota OKI (2000). Organisasi Internasional yang menjadi pengamat untuk OKI ialah Liga Arab (1975), Perserikatan Bangsa-Bangsa (1976), Gerakan Non Blok (1977), Uni Afrika (1977), Organisasi Kerja Sama Ekonomi (1995)²⁹

²⁸Organisation Of Islamic Cooperation ; Member State. Diakses dalam <https://www.oic-oci.org/states/?lan=en> (09/05/18, 01:21 WIB)

²⁹ OIC, Members Observers, diakses dalam https://www.oicoci.org/page/?p_id=179&p_ref=60&lan=en (09-05-18, 01:40 WIB)

2.2 UPAYA OKI MEPERJUANGKAN PALESTINA

OKI merupakan organisasi internasional di Dunia Islam yang selalu memberikan respon terhadap apa yang dialami warga Palestina sebagai akibat dari penindasan rezim Israel. Hal itu bisa di lihat dari latar belakang berdirinya adalah dampak dari terjadinya konflik Arab-Israel, khususnya perang tahun 1967 yang mengakibatkan jatuhnya kota suci Al Quds (Yerusalem), dimana didalamnya terdapat masjid Al Aqsha ke tangan Israel. Komite Al Quds menjadi salah satu organ penting didalam tubuh OKI³⁰.

Palestina sebagai negara anggota OKI, dengan berbagai dorongan dan bantuan dari negara-negara anggota OKI lainnya berupaya bergotong royong mencari penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Saat awal terjadinya konflik, oki sulit menempatkan posisi menyikapi konflik karena Palestina masih lemah dalam hal kedaulatan negara³¹. Namun OKI menganggap isu Palestina merupakan isu yang sangat penting dalam kaitannya dengan persatuan umah maka semua anggota OKI dianggap penting untuk ikut andil dalam penyelesaian konflik ini. Ada beberapa hal yang dilakukan OKI untuk penyelesaian Palestina. Diantaranya OKI dengan tegas menolak semua resolusi yang menentang status Palestina sebelum tahun 1967 dan mendukung berdirinya Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)

³⁰ Reza Sihbudi, 2007, *Menyandera Timur Tengah*, Penerbit Mizan, Jakarta. Hal : 329.

³¹ Lia Waskita, 2014, *Resolusi konflik OKI dalam KTT ke 12 di Kairo, Mesir dalam upaya penyelesaian konflik Suriah paska Arab Spring tahun 2011-2014*. Skripsi, Jogja : Jurusan HI, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hal. 28.

pada Mei 1964. OKI mengutuk semua negara yang mengadakan kerjasama politik, diplomatik dan ekonomik dengan Israel.³²

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke 2 di Pakistan pada Desember 1970 menghasilkan final komuke yang memutuskan untuk memfasilitasi perwakilan PLO melalui negara muslim dan mendukung perjanjian Kairo untuk melengkapi kerjasama kordinasi antara Yordania dan PLO dalam melawan Israel. Pada KTM ke 4, OKI membuat kebijakan mengakui bahwa PLO merupakan perwakilan yang sah dari rakyat palestina dan mendorong negara-negara anggota untuk memberikan ijin dibentuknya kantor PLO di negara-negara islam.³³ OKI juga mendorong relawan untuk ikut andil dalam jihad pembebasan tanah suci dan meminta negara-negara Islam untuk menjauhi hubungan politik dan ekonomi dengan Israel. Pada KTT ke 12 di Mesir tahun 2013 OKI mengambil langkah praktis yakni meminta negara-negara untuk mendukung anggaran dana pertahanan Palestina dan untuk membiayai Rencana Strategis Bidang Pengembangan Kota Al Quds sebesar US \$100 juta serta iuran bulanan sebesar US \$20 juta. Pembiayaan tersebut dilaksanakan melalui konferensi donor negara-negara anggota, Sekretris Jendral, Islamic Developing Bank dan lembaga-lembaga Internasional³⁴.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* Hal. 30.

2.3 KLAIM AS ATAS YERUSALEM

2.3.1 POSISI AS DALAM KONFLIK PALESTINA-ISRAEL

Israel sejak pertama kali mendeklarasikan kemerdekaannya selalu mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat. Bahkan AS adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Israel pada tahun 1948 dengan Presiden pertamanya Dr. Chaim Weizmann, kemudian diikuti oleh Rusia dan beberapa negara lainnya³⁵. Semenjak itu AS selalu menjadikan Israel sebagai tujuan utamanya di timur tengah. Bagi AS, Israel adalah sebuah aset strategis yang secara dasar-dasar moral harus didukung penuh karena Israel adalah penganut demokrasi sekuler dengan gaya hidup Barat. Kaum Yahudi bahkan menduduki posisi-posisi penting dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat seperti Dewan Keamanan Nasional (NSC), Departemen Luar Negeri, Intelejen bahkan Kongres konsisten mendukungnya. Oleh karena itu, tidak seorangpun kandidat presiden Amerika Serikat dalam politik Israel sangat berpengaruh, dalam banyak hal kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah sangat menggambarkan bagaimana komitmen Amerika Serikat dalam mempertahankan hubungan dengan Israel dan menempatkannya sebagai mitra khusus. Dengan status istimewa tersebut, Israel mendapat dukungan politik, ekonomi, dan militer yang luar biasa dari Amerika Serikat, saat menghadapi bahaya dan sudah bisa dipastikan dimana posisi Amerika Serikat dalam konflik Palestina-Israel adalah Amerika Serikat lebih cenderung memihak pada sekutunya Israel³⁶.

³⁵ Yusliani Noor, 2014, *Sejarah Timur-Tengah*, Yogyakarta, Penerbit Ombak. Hal. 329

³⁶ Vera Ellen Paat, *Posisi Amerika Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel*, Jurnal, Fisip Unsrat. Hal. 2

AS dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel adalah berperan sebagai mediator dalam berbagai perundingan. Diantaranya perundingan Oslo 1, Oslo II, Perundingan Hebron (januari 1997), Perundingan Wye River 1 (desember 1997), Wye River II (1999), Perundingan Camp David (2000), Konferensi Annapolis (2007), dan berbagai upaya negosiasi langsung pada era Presiden Barrack Obama. AS memang melakukan berbagai upaya perundingan dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Akan tetapi posisi AS adalah memihak pada Israel. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Amerika Serikat adalah keturunan Yahudi dan mempunyai organisasi-organisasi yang terstruktur yang menduduki posisi-posisi tertentu di dalam pemerintahan. Perekonomian Amerika Serikat juga kuasai oleh sebagian besar orang Yahudi³⁷.

AS pada masa presiden Donald Trump kembali menegaskan posisinya sebagai pendukung Israel. Pada Rabu, 6 Desember 2017 bertempat di Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyatakan sikap bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibukota negara Israel. Realisasi dari kebijakan tersebut yakni Presiden Trump memerintahkan jajarannya untuk segera memindahkan kedutaan besar AS yang berada di Tel Aviv ke kota Yerusalem³⁸.

³⁷ *Ibid.* Hal. 2-6

³⁸ *Statement by President Trump on Jerusalem, 2017*, diakses dalam https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-jerusalem/?utm_source=link, (22/05/2018. 00:16 WIB)

2.3.2 REAKSI DUNIA INTERNASIONAL

Kebijakan yang dikeluarkan Gedung Putih tersebut akhirnya memicu kecaman dan penolakan dari berbagai pihak di hampir seluruh dunia. Diantaranya, Paus Fransiskus, Pemimpin umat Katolik sedunia memberikan pernyataan sesaat sebelum Trump mengumumkan kebijakan AS terkait status Yerusalem. Paus Fransiskus menegaskan untuk membela status quo Yerusalem. Status quo yang dimaksud adalah pemahaman bersama di antara komunitas keagamaan dengan penuh hormat terhadap tempat-tempat suci di Yerusalem dan Bethlehem. Setidaknya tiga agama, yakni Islam, Yahudi dan Kristen memiliki tempat suci di kedua wilayah itu³⁹.

Pernyataan Paus Fransiskus dilansir Reuters dan AFP ; *"Saya tidak bisa diam saja soal kekhawatiran mendalam saya terkait situasi yang muncul beberapa hari terakhir. Pada saat bersamaan, saya memohon dengan tulus kepada semua pihak untuk menghormati status quo kota itu (Yerusalem), sejalan dengan resolusi-resolusi PBB. Yerusalem adalah kota yang unik, sakral bagi umat Yahudi, Kristen dan Muslim. menjaga status quo itu penting demi menghindari munculnya elemen ketegangan baru di dunia yang telah bobrok oleh begitu banyak konflik. Yerusalem memegang 'panggilan khusus untuk perdamaian'. Saya berdoa kepada Tuhan agar identitas ini dijaga dan dikuatkan demi Tanah Suci, Timur Tengah dan seluruh dunia, dan agar kebijaksanaan juga kehati-hatian bisa diberlakukan."*⁴⁰

³⁹ Novi Christiastuti, 2017, *Tanggapi Rencana Trump, Paus Fransiskus: Hormati Status Quo Yerusalem*, diakses dalam <https://news.detik.com/internasional/d-3758089/tanggapi-rencana-trump-paus-fransiskus-hormati-status-quo-yerusalem>. (22/05/2018. 08:16 WIB)

⁴⁰ *Ibid.*

Sebelum menyampaikan pernyataannya, Paus Fransiskus bertemu dengan sekelompok warga Palestina yang ikut dalam dialog lintas agama di Vatikan. Sedangkan sehari sebelumnya, Paus berbicara via telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Percakapan telepon itu membahas rencana Trump mengakui Yerusalem dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke sana.⁴¹

Reaksi penolakan juga datang PBB, Uni Eropa (UE) dan Rusia. Sekretaris Jendral PBB, Antonio Guterres mengatakan tidak ada alternatif terhadap penyelesaian dua negara antara Israel dan Palestina dan bahwa Yerusalem merupakan masalah penentuan status yang harus diselesaikan melalui perundingan langsung.⁴² Melalui Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan bahwa Uni Eropa bersatu mendukung Yerusalem sebagai ibu kota baik Israel maupun negara Palestina di masa depan. Mogherini menyatakan bahwa Uni Eropa tidak akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel hingga tercapainya kesepakatan perdamaian Israel-Palestina, yang mencakup status akhir kota tersebut. Penolakan Rusia diungkapkan langsung oleh Presiden Vladimir Putin usai mengadakan pertemuan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, di Ankara. Putin mengatakan keputusan Presiden Trump bisa 'menghapus prospek perdamaian' antara Israel dan Palestina⁴³.

Respon penolakan juga datang Presiden Perancis Emmanuel Macron, menyatakan tidak sependapat dengan keputusan Trump dan menginginkan solusi

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Tasrief Tarmizi, *Arab, Eropa, PBB menentang pengakuan Trump atas Yerusalem*. Diakses dalam <https://www.antaranews.com/berita/669444/arab-eropa-pbb-menentang-pengakuan-trump-atas-yerusalem> (22/05/2018. 14:18 WIB)

⁴³ ____, *Uni Eropa dan Rusia tolak dukung Trump akui Yerusalem sebagai ibu kota Israel*, diakses dalam <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-42318024>. (22/05/2018. 14:34 WIB)

dua negara dalam penyelesaian masalah ini. Macron menegaskan bahwa urusan Yerusalem seharusnya dibicarakan antara Israel dengan Palestina di bawah pengawasan PBB.⁴⁴ Senada dengan Macron, Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menginginkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel terkait masalah Yerusalem dan kota ini tetap menjadi ibukota bersama. May menambahkan bahwa keputusan Trump terkait Yerusalem bisa menjadi penghambat prospek perdamaian di kawasan.⁴⁵

Penolakan juga datang dari negara benua Amerika. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Trudeau mengatakan "*Kami tidak akan memindahkan Kedutaan Besar Kanada untuk Israel ke Yerusalem. Kanada memiliki kebijakan berjangka panjang untuk Timur Tengah. Kami tetap mengupayakan solusi dua negara melalui negosiasi langsung*".⁴⁶

2.3.3 REAKSI NEGARA-NEGARA ANGGOTA OKI

Respon lantang juga disuarakan oleh seluruh negara anggota OKI. Pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan "*AS mengklaim bahwa mereka sebenarnya ingin mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina karena mereka payah dan gagal. Palestina akan bebas dan rakyatnya akan jadi pemenang.*" Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud "*Langkah berbahaya*

⁴⁴ Veronika Yasnita, *Keputusan Trump soal Yerusalem Tuai Kemarahan Para Pemimpin Negara*, diakses dalam <https://internasional.kompas.com/read/2017/12/07/08253691/keputusan-trump-soal-yerusalem-tuai-kemarahan-para-pemimpin-negara> (22/05/2018, 09:50 WIB)

⁴⁵ Harriet Agerholm, *Theresa May calls Donald Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital 'unhelpful for peace prospects'*, diakses dalam <http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/jerusalem-theresa-may-trump-response-latest-news-statement-a8095986.html>, (22/05/2018, 10:10 WIB)

⁴⁶ Ruth Vania, *Berbagai Kecaman Pemimpin Dunia Soal Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel*, diakses melalui <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/12/08/berbagai-kecaman-pemimpin-dunia-soal-pengakuan-yerusalem-sebagai-ibu-kota-israel?page=all> (22/05/2018, 11:10 WIB)

seperti itu akan menyulut reaksi dari muslim di seluruh dunia, karena status spesial Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa."

Raja Yordania Abdullah II "*Komunitas internasional harus bahu-membahu memegang tanggung jawab dengan mengambil keputusan tegas dan suportif untuk mencapai perdamaian dan menyelesaikan masalah Palestina.*" Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi "*(Pemerintah AS) jangan mempersulit situasi dengan mengambil langkah yang merusak kesempatan menuju perdamaian di Timur Tengah.*" Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan "*Bapak Presiden Trump, Yerusalem adalah sebuah 'garis batas' bagi muslim! (Pengakuan) ini bisa membuat kami memutus hubungan diplomasi dengan Israel.*"⁴⁷

Menteri Luar Negeri Qatar, Sheik Mohammed bin Abdulrahman mengatakan *keputusan Trump merupakan hukuman mati bagi semua orang yang mencari kedamaian. Warga Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka. Sementara, Israel bersikeras kota ini adalah ibu kota yang bersatu, dan tak dapat dibagi.*⁴⁸

Respon juga datang dari Malaysia. Melalui Kementrian luar Negri, Malaysia menyatakan bahwa isu Yerusalem merupakan inti dari konflik dan mendesak seluruh negara anggota PBB untuk tidak mengakui adanya perubahan di garis-garis tapal batas 1967, termasuk sehubungan dengan Yerusalem. Menteri

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Veronika Yasnita, *Loc. Cit*

Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein menyatakan bahwa Malaysia bersiap mengirim pasukan militernya ke Yerusalem jika diperlukan⁴⁹.

Pemerintah Indonesia juga memberikan respon. Presiden Joko Widodo meminta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan PBB segera mengadakan sidang darurat guna membahas permasalahan ini dan meminta Presiden Trump untuk mempertimbangkan ulang akan keputusannya terhadap status kota Yerusalem.⁵⁰

Walaupun klaim sepihak AS terkait pemindahan ibukota Israel ke Yerusalem menuai penolakan dari dunia internasional namun Trump tetap bersikukuh atas sikapnya tersebut. Akhirnya masalah ini dibawa ke PBB dengan langkah Mesir mengajukan draf resolusi yang menegaskan bahwa Setiap keputusan dan tindakan yang bertujuan untuk mengubah karakter, status atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku, dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi DK-PBB. Draf ini didukung oleh 14 negara, dari 15 negara anggota DK-PBB, dan diveto oleh AS.⁵¹

Setelah veto AS terhadap draf resolusi yang diajukan Mesir, negara-negara Arab dan anggota OKI mengajukan dilaksanakannya sidang umum di PBB. Majelis Umum PBB kemudian menggelar sidang darurat pada tanggal 21 Desember 2017. Sidang yang dilaksanakan di markas PBB, New York, berhasil menghimpun mosi penolakan dari mayoritas peserta sidang terkait kebijakan Trump atas Yerusalem.

⁴⁹ Arie Mega Prastiwi, *Krisis Yerusalem, Malaysia Siap Kirim Tentara Jika Dibutuhkan*, <https://www.liputan6.com/global/read/3192189/krisis-yerusalem-malaysia-siap-kirim-tentara-jika-dibutuhkan> (22/05/2018, 19:10 WIB)

⁵⁰ Telly Nathalia, *Indonesia Condemns Trump's Recognition of Jerusalem as Israel's Capital*, diakses dalam <http://jakartaglobe.id/news/indonesia-condemns-trumps-recognition-jerusalem-israels-capital/>, (22/05/2018, 21.31 WIB)

⁵¹ *US vetoes resolution on Trump's Jerusalem decision*, diakses dalam <http://www.aljazeera.com/news/2017/12/vetoes-resolution-trump-jerusalem-decision-171218153627200.html>, (22/05/2018, 22:16 WIB)

Dari total 193 negara anggota PBB 128 negara menolak kebijakan Trum, 35 negara memilih untuk abstain dan hanya 9 negara yang setuju sementara 21 lainnya memilih untuk tidak hadir saat voting berlangsung.

Dengan ini PBB mengingatkan kembali bahwa status Kota Suci Yerusalem adalah final, adapun masalah yang terjadi di kota ini harus diselesaikan melalui negosiasi yang sejalan dan relevan sesuai dengan resolusi PBB.⁵² Akibat dari ketetapan AS ini, kepercayaan negara-negara di dunia terhadap AS semakin menurun dan AS tidak di percaya lagi untuk menjadi mediator bagi kedua negara karena sudah jelas menyalahi resolusi PBB dan berpotensi menyulut perang antar kedua negara.

Selain merespon dengan kecaman, OKI juga melakukan berbagai upaya penolakan terhadap klaim ini. Upaya yang dilakukan OKI adalah dengan melakukan Konsolidasi Internal dan Diplomasi Eksternal.

⁵² UN News, *General Assembly demands all States comply with UN resolutions regarding status of Jerusalem*, diakses dalam https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58330#.Wm6rc6hl_IV, (22/05/2018, 23:27 WIB)